

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partai politik merupakan institusi politik yang memegang peranan strategis dalam menyalurkan aspirasi kelompok-kelompok masyarakat. Keberadaan partai politik telah menjadi unsur yang melekat dalam sistem demokrasi, karena berfungsi sebagai wadah yang dibentuk atas dasar kesamaan visi, tujuan, dan cita-cita bersama guna mewujudkan kepentingan politik anggotanya serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Partai politik merupakan sebuah organisasi yang sifatnya nasional, dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Sebagai entitas politik, partai politik memiliki ideologi tertentu atau tujuan umum yang menjadi dasar pijakan bagi setiap anggota dalam menjalankan aktivitas politiknya. Kesamaan visi, nilai-nilai, dan cita-cita tersebut menjadi faktor pemersatu yang mengarahkan langkah dan pandangan seluruh kader atau anggota partai dalam mencapai tujuan bersama. Sebagaimana organisasi pada umumnya, partai politik juga memiliki struktur keanggotaan atau kepengurusan yang terdiri

atas berbagai bidang, divisi, atau departemen, yang berfungsi untuk menunjang efektivitas kerja organisasi dalam melaksanakan perannya sebagai institusi politik.

Setiap institusi, termasuk organisasi politik seperti partai politik, tidak hanya menjalankan fungsi kepartaian, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi politik. Tugas pokok dan fungsi inilah yang menjadi landasan utama serta alasan mendasar bagi pembentukan partai politik. Secara umum, fungsi utama partai politik adalah untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan sebagai sarana dalam mewujudkan program-program yang telah dirumuskan berdasarkan ideologi masing-masing (Gatara & Sahid, 2007). Miriam Budiarjo menyampaikan setidaknya ada empat fungsi utama parpol di dalam sebuah negara yang demokratis, diantaranya: (1) menjadi sarana untuk berkomunikasi politik, (2) menjadi sarana untuk bersosialisasi politik, (3) sebagai sarana dalam rekrutmen politik, (4) sebagai sarana kontrol konflik (conflict management) (Budiarjo, 1981). Fungsi rekrutmen dalam partai politik merupakan salah satu aspek krusial, karena mencerminkan strategi dan mekanisme partai dalam menjaring individu maupun kelompok masyarakat untuk direkrut sebagai anggota atau kader, guna memperkuat struktur internal dan memperluas basis dukungan politik.

Dalam menjalankan berbagai fungsi politiknya, partai politik memerlukan mekanisme penggerak internal yang berperan dalam memastikan efektivitas operasional partai. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah keberadaan Organisasi Sayap Partai (OSP), yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai dalam melaksanakan tugas-tugas politik. Pembentukan organisasi sayap partai tidak dilakukan tanpa tujuan yang jelas. Menurut Sunarlan (2017:5), terdapat tiga peran

utama yang dijalankan oleh OSP. Pertama, organisasi ini memainkan peran strategis sebagai jembatan penghubung antara partai politik dan masyarakat pemilih, yang diwujudkan melalui bentuk organisasi seperti organisasi perempuan, kepemudaan, kemahasiswaan, serikat buruh, organisasi keagamaan atau kepercayaan, serta berbagai organisasi sosial lainnya. Kedua, keberadaan OSP dimaksudkan untuk memperluas jangkauan partai dalam menyerap dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, sekaligus memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan di internal partai.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Partai Politik, Pasal 12 ayat 10 berbunyi bahwa salah satu hak parpol ialah membuat dan mempunyai organisasi sayap sendiri. Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan dalam pasal tersebut, Masrojahan, sebagaimana dikutip oleh Panjaitan (2019), menyatakan bahwa organisasi sayap merupakan entitas yang dibentuk oleh partai politik atau kelompok yang secara sukarela menyatakan diri sebagai bagian dari sayap suatu partai politik. Merujuk pada penjelasan dalam Undang-Undang, terdapat dua mekanisme pembentukan organisasi sayap, yaitu: (1) pembentukan secara tidak langsung; dan (2) pembentukan secara langsung oleh partai politik. Lebih lanjut, organisasi sayap yang dibentuk oleh partai dapat secara eksplisit dicantumkan dan diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Namun demikian, terdapat pula organisasi sayap yang meskipun tidak diatur secara rinci dalam AD/ART, tetap diakui eksistensinya sebagai bagian dari struktur pendukung partai politik.

Tabel 1.1
Jumlah organisasi sayap partai politik

No	Partai	Jumlah organisasi sayap
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5
2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	13
3.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	7
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	8
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	6
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	16
7.	Partai Demokrat (PD)	20

Sumber: Masrojahan, 2019

Masrojahan (2019) menjelaskan bahwa organisasi yang tidak dibentuk secara langsung oleh partai politik dapat berbentuk organisasi masyarakat (ormas), yang kemudian menyatakan diri sebagai organisasi sayap dari partai tertentu. Ormas yang berperan sebagai organisasi sayap partai dapat bersifat permanen maupun sementara. Ormas yang hanya berfungsi sebagai sayap partai untuk tujuan politik tertentu, seperti dalam konteks pemilihan umum, dapat dikategorikan sebagai organisasi sayap sementara. Contohnya, ormas yang menjadi bagian dari sayap partai hanya untuk mendukung perhelatan politik seperti Pemilihan Presiden

(Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan momen politik lainnya (Panjaitan, 2019). Bagaimanapun juga organisasi masyarakat yang berafiliasi pada partai tertentu membawa basis massa. Basis massa inilah yang secara pragmatis dibutuhkan untuk perluasan partisipasi politik bagi kepentingan partai induknya.

Komunitas Juang Jawa Tengah adalah salah satu unit yang berperan sebagai mesin partai, yang mengumpulkan kader-kader muda PDI Perjuangan di wilayah Jawa Tengah. Sebagai organisasi sayap partai PDI Perjuangan di Jawa Tengah, Komunitas Juang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan bagi para pemuda dan kader muda partai. Dasar hukum pembentukan Komunitas Juang Jawa Tengah tercantum dalam dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta dalam Peraturan Partai yang dihasilkan pada Kongres Ke-III PDI Perjuangan mengenai Kader Komunitas Juang (halaman 102), serta pada Kongres Ke-IV PDI Perjuangan yang diselenggarakan pada tahun 2015 di Bali.

Dikutip dari website resmi Komunitas Juang Jawa Tengah, organisasi ini mulai dibentuk di tahun 2013 pada bulan Mei melalui Program Pembinaan Kader Komunitas Juang. Komunitas Juang di Jawa Tengah ini lahir pertama kali di Sebelum dikenal dengan nama Komunitas Juang Banyumas, organisasi ini pada awalnya bernama Komunitas Juang Kabupaten Banyumas, karena pada bulan November, sejumlah Mentor Juang pertama kali diterjunkan ke Banyumas. Kabupaten Banyumas dipilih sebagai tempat kelahiran Komunitas Juang generasi pertama. Sebanyak 460 kader dari Komunitas Juang (KJ) Kabupaten Banyumas angkatan pertama dilantik oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu periode 2009-

2014, Ibu Puan Maharani, di GOR Satria Purwokerto pada tanggal 16 Februari 2014. Acara tersebut juga dihadiri oleh Ibu Megawati Soekarnoputri yang memberikan sambutan dan arahan kepada para kader angkatan pertama Komunitas Juang.

Komunitas Juang kemudian memperluas jangkauannya, tidak hanya terbatas pada Kabupaten Banyumas, tetapi juga meluas ke seluruh wilayah Jawa Tengah. Sebagai bagian dari ekspansi tersebut, Komunitas Juang Banyumas mengubah namanya menjadi Komunitas Juang Jawa Tengah setelah pelantikan kader Komunitas Juang Angkatan ke-III pada tanggal 29 Januari 2017 di Blitar, Jawa Timur. Pelantikan ini tidak hanya dihadiri oleh kader-kader dari Kabupaten Banyumas, tetapi juga oleh kader-kader dari berbagai kabupaten di wilayah Solo Raya, seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Sebanyak 451 kader dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah dilantik oleh Ibu Nuniek Sri Yuningsih, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Tengah.

Tabel 1.2
Jumlah kader Komunitas Juang Angkatan ke-III

NO.	Asal Daerah	Jumlah Kader
1.	Sukoharjo	71
2.	Wonogiri	107
3.	Sragen	21
4.	Klaten	51
5.	Karanganyar	24

6.	Banyumas	177
----	----------	-----

Sumber: Derap Juang

Menurut informasi yang dilansir dari Derap Juang (Safii, 2021), Ketua Dewan Mentor Korps Komunitas Juang Jawa Tengah, Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A., menyatakan bahwa hingga tahun 2024, jumlah kader Komunitas Juang Jawa Tengah yang telah dikader dan dilantik mencapai sekitar 4.700 orang. Sementara itu, jumlah calon kader yang belum dilantik, yang disebut sebagai Calon Kader Juang (CKJ), diperkirakan mencapai sekitar 4.000 orang.

Peran Komunitas Juang Jawa Tengah sejak awal pembentukannya hingga saat ini dianggap sangat signifikan dalam mendukung perkembangan partai PDI Perjuangan di wilayah Jawa Tengah. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah, Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A., yang dikutip dari Times Indonesia (Futaki, 2020), kader Komunitas Juang memiliki kontribusi yang besar dalam memperkuat posisi PDI Perjuangan. Kader-kader tersebut juga sering dilibatkan dalam berbagai agenda baik yang bersifat internal maupun eksternal partai. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Dewan Mentor Komunitas Juang Jawa Tengah, Jamal Hafid Dinillah, dalam wawancara dengan Berita Jateng (Kholis, 2020), keterlibatan Komunitas Juang dalam berbagai kegiatan besar partai tidak hanya terbatas pada satu kesempatan, melainkan telah turut berkontribusi dalam sejumlah acara penting lainnya, seperti Kongres Bali, Rakornas, Rakernas, serta Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) partai.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa organisasi sayap partai memiliki peran yang sangat penting sebagai perpanjangan

tangan dalam melaksanakan fungsi partai dan mewujudkan tujuan politik partai tersebut, termasuk dalam hal ini peran Komunitas Juang Jawa Tengah. Meskipun demikian, masih banyak kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami peran Komunitas Juang Jawa Tengah sebagai salah satu organisasi sayap yang berbasis pada kalangan muda PDI Perjuangan, serta sebagai wadah pendidikan dan pelatihan bagi kader muda "Partai Banteng" di Jawa Tengah. Selain itu, meskipun Bambang Wuryanto, yang lebih dikenal dengan julukan "Bambang Patjul", menegaskan bahwa Komunitas Juang memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat PDI Perjuangan hingga saat ini, masih terdapat kekurangan dalam menjelaskan secara rinci tentang berbagai kontribusi yang telah diberikan oleh Komunitas Juang tersebut.

Penelitian-penelitian serupa juga lebih banyak membahas mengenai partisipasi politik atau kontribusi politik dari organisasi sayap partai yang dimiliki oleh semua partai politik. Sekalipun ditemui penelitian serupa yang membahas mengenai kaderisasi, biasanya hanya membahas mengenai strategi atau konsep perekrutannya saja.

Dari uraian diatas penulis memberikan fokus pada penelitian kali ini terhadap proses dan mekanisme kaderisasi yang dilakukan Komunitas Juang sebagai sebuah organisasi sayap partai PDI-Perjuangan Jawa Tengah yang memiliki fungsi perekrutan dan pendidikan kader terhadap anak muda.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses kaderisasi

Komunitas Juang dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi perekrutan dan pendidikan kader?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis proses kaderisasi Komunitas Juang dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi perekrutan dan pendidikan kader.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta bisa memperluas khazanah keilmuan yang lebih luas, baik bagi diri penulis, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya mengenai peranan organisasi sayap partai politik.

Selain itu dapat menjadi referensi bagi tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan organisasi dibawah naungan sebuah partai politik.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Penulis

Diharapkan hasil dari penelitian ini tidak hanya memperkaya daya pikir dan wawasan pengetahuan penulis, tetapi juga dapat menjadi pendorong pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2.2. Bagi Komunitas Juang Jawa Tengah

- a. Dapat menganalisis proses kaderisasi Komunitas Juang Jawa

Tengah yang menjadi organisasi sayap partai PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi-fungsi kepartaian maupun fungsi keorganisasian.

- b. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi perkembangan organisasi Komunitas Juang kedepan untuk pengurus, kader maupun partisipan Komunitas Juang Jawa Tengah.

1.4.2.3. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi penelitian kedepan yang berkaitan tentang Komunitas Juang maupun organisasi yang dibawah naungan partai politik.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam membandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian serupa yang pernah dilakukan, dengan tema yang hampir mirip dan/atau sama. Pada bagian ini, peneliti berniat untuk menjelaskan orisinalitas penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini pula, peneliti bermaksud untuk mencantumkan penelitian yang relevan, serta merangkumnya. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang peneliti lakukan.

Penelitian yang pertama berjudul “Politik Sayap Partai: Taruna Merah Putih dan PDI Perjuangan” yang ditulis oleh Andreas Daniel Adi Vibhisana (2021). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengambilan data yang meliputi

observasi, dan semi-structured in-depth interview serta data yang didapat dari studi dokumen. Hasil dari pengumpulan data lalu dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Taruna Merah Putih merupakan Organisasi Sayap Partai (OSP) yang digunakan sebagai etalase untuk menunjukan “tampilan lain” dari partai politik yang selama ini terkesan kaku dan membosankan. TMP menggunakan strategi-strategi yang khas untuk menarik dukungan dari kaum muda daripada langsung dilibatkan dalam kerja-kerja partai.

Persamaan penelitian dengan yang dilakukan oleh Andreas Daniel Adi Vibhisana adalah sama-sama menggali dan mencari tau mengenai peran dan eksistensi organisasi sayap partai pada PDI-Perjuangan sedangkan perbedaannya adalah Andreas Daniel Adi Vibhisana meneliti mengenai Taruna Merah Putih dan bagaimana peran nya pada kemenangan PDI-P di Kota Surakarta dapat dari sejak reformasi.

Penelitian kedua berjudul “Dukungan Masyarakat Pada Gerakan Politik Komunitas Juang Zona Tiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyumas” yang ditulis oleh Melly Sri Hastuti (2017). Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang mengikuti metode induktif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah yang didapat dari dukungan masyarakat pada gerakan politik Komunitas Juang zona tiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyumas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat mendukung program kerja dari Komunitas Juang zona tiga, hal itu

dapat di lihat dari mulai salah satu warganya mempersilahkan mereka para kader untuk tinggal di posko yang mana itu adalah rumah dari salah seorang warga sekitar untuk di tempati sebagai posko dan keikutsertaannya masyarakat berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh Komunitas Juang zona tiga.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Melly Sri Hastuti adalah metode yang sama yakni kualitatif deskriptif dan fokus penelitian pada peran adanya Komunitas Juang sebagai organisasi sayap partai PDI-Perjuangan, sedangkan perbedaan nya adalah Melly Sri Hastuti meneliti mengenai peran Komunitas Juang dalam hubungannya dengan masyarakat yang ada pada zona mereka.

Penelitian ketiga berjudul “Rekrutmen Politik dan Partai Politik:Strategi Rekrutmen Partai Melalui Organisasi Sayap Partai Tidar Dan PKS Muda Kota Depok Untuk Meningkatkan Dukungan Pada Periode 2021-2025” yang ditulis oleh Ely Eviana Wulandari (2024). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan hasil data dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah adanya perbedaan pada strategi rekrutmen yang digunakan oleh Tidar Kota Depok dengan PKS Muda Kota Depok, yaitu: Tidar tidak memiliki acara rekrutmen tersendiri hanya mengandalkan program yang mereka miliki sedangkan PKS Muda memiliki program perekrutannya sendiri, dan Tidar tidak memiliki sosial media sedangkan PKS Muda memilikinya dan dimanfaatkan sebagai sarana rekrutmen.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Melly Sri Hastuti adalah menggunakan metode dan teknik analisis yang sama, selain itu juga sama mengkaji mengenai organisasi sayap partai sebuah partai politik dan korelasi nya pada konstelasi politik. Perbedaan penelitian nya adalah Melly Sri Hastuti meneliti mengenai Tidar dan PKS Muda sebagai organisasi sayap partai.

Penelitian keempat berjudul “Strategi Rekrutmen Partai Gerindra dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya” yang ditulis oleh Amaliya Hidayatul Fajrina (2017). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara *indepth interview* dengan narasumber adalah para pengurus aktif dari DPC Partai Gerindra. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Gerindra di Kota Surabaya memiliki beberapa strategi dalam melaksanakan rekrutmen kader yakni, sistem terbuka, sistem figure, dan sistem patronik.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Amaliya Hidayatul Fajrina adalah menggunakan metode dan pendekatan yang sama yakni kualitatif dengan metode wawancara terhadap narasumber yang terpilih. Objek penelitian juga sama membahas mengenai kaderisasi partai politik terhadap para pemuda. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh Amaliya Hidayatul Fajrina lebih membahas secara umum apa saja strategi yang dilaksanakan oleh Gerindra, bukan terhadap pada proses pelaksanaan kaderisasinya.

Penelitian kelima berjudul “Peran Organisasi Sayap Partai Politik Angkatan Muda Partai Golkar dalam Perekrutan Kader Partai Golkar di Kota

Banjarmasin” yang ditulis oleh Ari Ariyadi (2021). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah editing, diskripsi, dan klasifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah perekrutan kader tidak semata-mata menambah jumlah anggota untuk syarat awal ketersediaan. Tantangan yang ditemukan adalah anak muda enggan untuk bergabung dengan partai politik disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai partai politik, serta citra buruk yang disebabkan oleh korupsi dan politik uang.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Ariyadi adalah pendekatan yang sama yakni kualitatif deskriptif, metode wawancara dan dokumentasi, serta bahasan yang sama yakni mengenai perekrutan kader sayap partai. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis tidak menggunakan metode observasi, serta penulis lebih menitikberatkan pada proses dan mekanisme kaderisasi yang dilakukan hingga tahapan pengkaryaan para kader.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Kaderisasi Partai Politik

Kaderisasi merupakan sebuah proses yang melibatkan pemikiran dan pengalaman sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang pada akhirnya membentuk karakter individu. Sebagai makhluk sosial dan subjek kebudayaan, manusia secara terus-menerus mengubah sistem dan cara hidupnya untuk mempermudah serta memperbaiki situasi yang dihadapinya.

Proses kaderisasi mengikuti perkembangan zaman, namun dengan tuntutan masa kini yang mengharuskan anggota suatu organisasi atau lembaga untuk memiliki pemikiran yang kritis dan wawasan yang luas, maka tipe kaderisasi yang dibutuhkan juga harus disesuaikan dengan tujuan tersebut (Syarifuddin, 2002).

Kaderisasi dapat diartikan sebagai proses pemilihan individu dalam konteks kegiatan politik, yang melibatkan penunjukan jabatan oleh pemerintah melalui media atau pencalonan diri oleh anggota organisasi. Jack C. Plano mengemukakan bahwa kaderisasi atau perekrutan anggota merupakan suatu proses pemilihan formal untuk mengisi posisi-posisi penting, seperti presiden, anggota parlemen, maupun aktivis (Labolo & Ilham, 2015).

Untuk melaksanakan fungsi utama partai politik, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilu, fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik menjadi aspek yang sangat krusial dan sering diterapkan oleh partai politik (Haris et al., 2016: 19). Dalam hal ini, partai politik memiliki peran penting dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk terlibat dalam sistem politik. Proses persiapan calon pemimpin tersebut berkaitan erat dengan fungsi kaderisasi, yang sebagaimana dijelaskan oleh Haris et al. (2016: 19), dalam rekrutmen secara tidak langsung juga berlangsung proses kaderisasi.

Menurut Triwidaryanta (2008: 13), kaderisasi merupakan suatu proses untuk mencari calon-calon unggul di antara anggota partai politik melalui

serangkaian kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan terarah, yang melibatkan partisipasi aktif individu dalam organisasi. Kaderisasi dapat dipahami sebagai ajang pendidikan bagi kader untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri mereka, dengan cara menanamkan ideologi serta mentransfer pengetahuan, sehingga menghasilkan kader-kader yang siap dan tangguh dalam menghadapi dinamika politik. Selain itu, kaderisasi juga berperan dalam memenuhi kebutuhan regenerasi kepemimpinan dan kepengurusan untuk menjaga kelangsungan eksistensi organisasi.

Triwidaryanta (2008: 14) menjelaskan bahwa kaderisasi dalam suatu organisasi dapat dibagi dalam dua aspek utama. Pertama, terkait dengan pelaku kaderisasi, yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam organisasi dan kebijakan-kebijakan yang melaksanakan fungsi regenerasi serta memastikan kelangsungan tugas-tugas organisasi. Kedua, adalah sasaran dari pelaksanaan kaderisasi, yang merujuk pada individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk melanjutkan visi dan misi organisasi.

Menurut Haris et al. (2016: 50), kaderisasi berfungsi sebagai proses internalisasi dalam partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas para kader dalam melaksanakan tugas-tugas partai sebagai fungsionaris. Dengan demikian, kader diharapkan dapat menjalankan amanat yang diberikan oleh partai, baik dalam peran mereka sebagai pengurus maupun pejabat publik di tingkat pusat maupun daerah. Kaderisasi juga berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan kepengurusan dan kepemimpinan yang berkelanjutan dalam organisasi. Oleh karena itu,

kaderisasi harus dilakukan secara profesional, sekaligus memastikan bahwa individu yang terpilih melalui proses rekrutmen memiliki kompetensi dan loyalitas terhadap partai. Selanjutnya, Haris et al. (2016: 50-51) menjelaskan bahwa untuk memudahkan identifikasi adanya proses kaderisasi dalam suatu partai, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai acuan.

Pertama, terdapat kurikulum atau silabus yang mengatur proses kaderisasi. Kedua, terdapat divisi yang bertanggung jawab atau menyelenggarakan kaderisasi. Ketiga, ada rentang waktu yang jelas untuk setiap tingkat jenjang kaderisasi. Keempat, hasil dari proses kaderisasi tersebut berupa pencapaian kapasitas yang diharapkan dari setiap level kaderisasi.

Menurut Haris et al. (2016: 52) kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Terbuka, prinsip terbuka dalam kaderisasi mengandung pengertian bahwa proses kaderisasi harus dapat diakses oleh seluruh anggota partai politik, yang berarti setiap anggota memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti pelatihan dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka kaderisasi. Prinsip ini sangat penting karena memberikan hak kepada seluruh kader untuk memperoleh pendidikan dan nilai yang seragam sebagai bagian dari keluarga besar partai politik. Jika kaderisasi tidak mengedepankan prinsip terbuka, hal ini dapat memicu konflik internal yang merugikan

partai, mengingat kemungkinan adanya pilih kasih atau preferensi terhadap beberapa kader tertentu, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kecemburuan antar kader.

2. Non-Diskriminatif, pemberian akses yang setara dalam proses kaderisasi juga mencerminkan bahwa mekanisme kaderisasi memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota untuk berpartisipasi dan/atau memperoleh promosi serta karier politik melalui proses kaderisasi, tanpa membedakan faktor seperti warna kulit, golongan, agama, gender, maupun suku. Prinsip ini sangat penting, sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, karena memberikan kesempatan yang sama besar bagi setiap individu tanpa memandang suku, agama, dan ras. Apabila proses kaderisasi dilakukan secara diskriminatif, maka citra partai tersebut dapat terpengaruh negatif di mata masyarakat.
3. Berjenjang, Penjenjangan kaderisasi dalam partai politik didasarkan pada pelapisan yang bersifat bertahap, berjenjang, atau piramidal. Misalnya, penjenjangan ini dapat disusun dalam beberapa tingkat, seperti tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut, atau dengan istilah lainnya. Sistem penjenjangan ini memiliki manfaat untuk memperdalam pemahaman kader mengenai nilai-nilai dan visi yang diusung oleh partai, sehingga mereka dapat menjadi kader terbaik yang mampu menduduki posisi-posisi strategis baik di dalam partai maupun di pemerintahan, sesuai dengan jenjang yang

telah mereka lalui. Tentunya, semakin tinggi jenjang yang dicapai, semakin tinggi pula posisi yang dapat diraih oleh kader tersebut.

Haris et al. (2016: 51) menekankan pentingnya bagi partai politik untuk mengembangkan pola pembinaan kader yang tidak hanya terprogram, terukur, dan sistematis, tetapi juga komprehensif serta berlaku secara menyeluruh di semua tingkatan kader dan wilayah. Pola pembinaan kader ini yang mencakup:

1. Penetapan norma, aturan, dan struktur institusi yang mendasari sistem pengkaderan, baik untuk pengkaderan umum maupun khusus;
2. Penerapan model rekrutmen yang bersifat terbuka dan demokratis;
3. Pengembangan sistem evaluasi yang berkelanjutan terhadap pembinaan kader;
4. Pembentukan jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader untuk meningkatkan kualitas kader dan melahirkan individu yang loyal serta berdedikasi tinggi;
5. Penerapan tindakan afirmatif dalam rekrutmen dan pola pembinaan kader perempuan, dengan tujuan meningkatkan representasi perempuan dalam partai politik, parlemen, dan jabatan publik.

Kaderisasi pada kelompok perempuan juga berarti meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perempuan terkait dengan peran yang dimainkan dalam partai politik, parlemen dan jabatan publik lainnya

Model pembinaan perempuan kader partai, baik dari segi strategi

pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan kelompok sasaran, kaderisasi oleh partai politik dibedakan atas dua model (Haris et al., 2016: 54) yakni:

1. Kaderisasi untuk Anggota Partai Politik

Secara umum, partai politik modern melaksanakan proses kaderisasi bagi anggotanya yang terdaftar dan membayar iuran keanggotaan secara teratur dalam periode waktu tertentu. Anggota yang memenuhi kriteria tersebut secara otomatis akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh partai politik dengan tujuan yang jelas. Kaderisasi anggota partai politik dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

2. Kaderisasi untuk non anggota partai politik

Organisasi sayap merupakan komponen yang tak terpisahkan dari suatu partai politik, di mana organisasi ini berperan sebagai sumber utama dalam proses kaderisasi partai. Organisasi sayap partai politik digunakan sebagai alat penting untuk menarik simpati dan dukungan massa, baik dalam rangka memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai. Melalui organisasi sayap, ideologi partai politik serta pembangunan karakter militansi kader dapat lebih efektif dilaksanakan, dibandingkan dengan sumber kaderisasi yang berasal

dari organisasi masyarakat lainnya

Berdasarkan tahapan urutan atau jenjang pengkaderan, proses tersebut dibedakan menurut tingkatan dari yang paling dasar hingga yang tertinggi, sebagai berikut (Haris et al., 2016: 55-58) :

1. Kaderisasi Tingkat Pertama

Kaderisasi pada tingkat pertama umumnya lebih fokus pada aspek internalisasi ideologi, visi, dan misi partai politik. Tujuan utama dari kaderisasi pada tingkat ini adalah untuk membangun budaya dan konsolidasi dalam tubuh partai politik di kalangan peserta kaderisasi. Selain proses internalisasi nilai-nilai partai, pada tahap ini kaderisasi juga bertujuan untuk membekali anggota partai dengan keterampilan manajerial dasar serta pengelolaan organisasi partai. Keterampilan manajerial yang diajarkan mencakup hal-hal teknis seperti penyelenggaraan rapat, perencanaan program, pelaksanaan program, kampanye, penggalangan dukungan, dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan tata kelola partai.

Pada tingkat pertama ini, kaderisasi juga mencakup pelatihan dalam bidang kepemimpinan, strategi pemenangan pemilu, komunikasi dengan media, dan public speaking yang disampaikan dengan pendekatan yang sederhana.

Kaderisasi tingkat pertama ditujukan untuk anggota partai politik atau organisasi sayap partai yang diproyeksikan untuk menjadi pengurus partai di tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD

di tingkat kabupaten/kota, atau kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Untuk kader yang diproyeksikan menjadi pengurus partai atau anggota badan legislatif di tingkat kabupaten/kota, perlu diberikan tambahan pembekalan mengenai penetapan fungsi pengawasan, pengelolaan anggaran dan legislatif, lobi politik, komunikasi politik, serta pembuatan dan evaluasi kebijakan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas di tingkat kabupaten/kota.

2. Kaderisasi Tingkat Madya

Kaderisasi pada tingkat madya dirancang untuk menghasilkan pengurus partai di tingkat provinsi, anggota DPRD tingkat provinsi, serta kepala daerah tingkat provinsi, dengan outcome yang diharapkan berupa pengurus partai tingkat provinsi, anggota DPRD, dan kepala daerah tingkat provinsi. Pada jenjang kaderisasi ini, para kader umumnya lebih banyak dibekali dengan keterampilan terkait kemenangan pemilu, seperti keterampilan dalam komunikasi politik, kepemimpinan, komunikasi interpersonal yang berkaitan dengan mobilisasi massa, keterwakilan politik, keterampilan pemecahan masalah, serta pembuatan kebijakan, termasuk strategi kampanye.

Durasi dan kurikulum modul kaderisasi pada jenjang madya biasanya lebih rinci, dengan fokus yang lebih besar pada peningkatan kapasitas dan keterampilan manajerial dalam

pemenangan pemilu, baik di lembaga legislatif maupun pemerintahan daerah. Dibandingkan dengan jenjang kaderisasi tingkat dasar, pada tingkat madya, aspek internalisasi budaya partai dan konsolidasi partai menjadi lebih sedikit, sementara keterampilan manajerial terkait kemenangan pemilu lebih dominan. Dalam konteks peningkatan keterampilan manajerial, kaderisasi tingkat madya bertujuan untuk memperkuat kontribusi partai politik dalam kemenangan pemilu, di samping urusan tata kelola partai politik di tingkat provinsi.

3. Kaderisasi Tingkat Utama .

Kaderisasi tingkat utama ditujukan bagi calon pengurus partai politik, anggota legislatif tingkat pusat, serta calon presiden dan wakil presiden. Pada jenjang kaderisasi ini, selain fokus pada internalisasi nilai-nilai partai, para kader juga diberikan pengetahuan yang mendalam mengenai masalah kepemiluan, baik yang berkaitan dengan regulasi maupun strategi kemenangan pemilu. Selain itu, mereka juga mendapatkan pembekalan mengenai manajerial yang mencakup pemahaman terhadap isu-isu yang berskala nasional dan global, kebijakan partai di tingkat nasional, strategi internasional, serta sistem ekonomi, hukum, pemerintahan, dan hubungan internasional.

Pentingnya pemahaman ini juga disertai dengan peningkatan keterampilan kader dalam komunikasi politik,

lobbying, dan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan dan komunikasi politik, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi publik, representasi, dan keterampilan pemecahan masalah (problem-solving skills) untuk isu-isu tingkat nasional, juga sangat ditekankan. Di samping itu, kemampuan untuk merumuskan kebijakan di DPR dan pemerintahan, manajemen waktu, serta pengetahuan tentang teknologi informasi, terutama yang terkait dengan masalah pemilihan dan pembuatan kebijakan, juga menjadi bagian integral dari pelatihan ini, yang di dalamnya turut melibatkan hubungan dengan media.

Fungsi kaderisasi dalam konteks partai politik atau organisasi adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan organisasi tersebut. Kader dalam suatu organisasi adalah individu yang telah melalui proses pelatihan dan persiapan dengan berbagai keterampilan serta disiplin ilmu, sehingga memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab di masa depan. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Bung Hatta, kaderisasi dalam kerangka kebangsaan dapat dipahami sebagai "menanam bibit." Artinya, untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas di masa depan, pemimpin pada masa sekarang harus menyiapkan dan membina kader-kader yang potensial untuk menggantikan kepemimpinan tersebut. Proses ini adalah bagian integral dari upaya memastikan keberlanjutan dan kesuksesan suatu organisasi atau bangsa.

1.6.1.1. Kader dan Pengkaderan

Menurut Kamisa dalam buku Syarifuddin (2002), istilah "kader" sering kali dikaitkan dengan anggota suatu organisasi atau persyarikatan, baik yang berorientasi sosial keagamaan maupun politik. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, "kader" diartikan sebagai individu yang diharapkan akan memainkan peranan penting dalam pemerintahan, partai, atau organisasi lainnya. Makna dari kata "kader" mencakup berbagai aspek, mengingat perannya yang sangat luas. Selain itu, seorang kader dipandang sebagai calon penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dalam suatu organisasi, baik itu dalam konteks politik maupun organisasi lainnya. Kaderisasi, dengan demikian, bukan hanya menjadi proses untuk menyiapkan individu dengan keterampilan dan pengetahuan tertentu, tetapi juga untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.

Dengan demikian, keberadaan kader dalam suatu organisasi atau lembaga memiliki posisi yang sangat krusial dan strategis. Untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan proses regenerasi kepemimpinan, sangat diperlukan ketersediaan kader-kader pemimpin yang kompeten dan efektif guna melanjutkan kepemimpinan organisasi secara berkesinambungan.

Pengkaderan merujuk pada upaya mendidik individu untuk menjadi penerus tongkat estafet suatu partai atau organisasi, yang

melibatkan generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan. Kader dipandang sebagai individu yang diharapkan mampu menduduki posisi strategis di pemerintahan, partai, dan lembaga lainnya. Proses pengkaderan adalah tindakan membentuk atau mendidik seseorang untuk menjadi anggota partai melalui pelatihan dan pembelajaran. Pembaruan kepemimpinan sendiri mengacu pada suatu proses di mana individu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang akan menggantikan posisi kepemimpinan di masa depan (Veithzall, 2014).

Dapat disimpulkan bahwa pengkaderan merupakan suatu proses pembentukan karakter individu agar mereka sejalan dengan ideologi yang dianut, serta memahami aturan-aturan yang berlaku dalam suatu organisasi atau lembaga. Melalui pengkaderan, diharapkan tercipta kader-kader yang memiliki keterampilan, wawasan yang luas, dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau lembaga tersebut.

Pengkaderan bagi suatu organisasi dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengaktualisasikan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anggota. Keberhasilan pengkaderan dapat diukur ketika calon kader berhasil disadarkan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, strategi pengkaderan merujuk pada metode yang efektif yang digunakan oleh organisasi untuk

menjalankan serangkaian kegiatan yang saling terkait, dengan tujuan membentuk kader yang dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi tersebut (Nofiard, 2013).

Pengkaderan merupakan upaya yang sering dilakukan oleh suatu organisasi untuk membangun karakter para kadernya. Proses ini mencakup penanaman nilai-nilai ideologi yang dijunjung tinggi oleh organisasi tersebut, serta pengembangan keterampilan kepemimpinan. Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan dalam proses pengkaderan, mengingat posisi kader di masa depan adalah untuk menggantikan kepemimpinan dalam organisasi tersebut.

1.6.2. Sayap Partai Politik

Menurut Haris et al. (2016:54), organisasi sayap merupakan bagian integral dari partai politik yang berfungsi untuk mendukung kinerja partai dalam menjangkau dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 12 ayat (10) menyatakan bahwa salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.

Dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (10) “Partai politik Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik”. Sesuai dengan maksud dari ayat tersebut, fungsi organisasi sayap partai politik adalah untuk mendidik masyarakat dalam mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang semuanya merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan daya kritis dan partisipasi politik

rakyat dalam sistem demokrasi. Selain itu, organisasi sayap juga berperan dalam membimbing, mendampingi, serta memberikan advokasi kepada masyarakat agar mereka memiliki keberanian dalam menuntut dan menegakkan hak-hak politik mereka.

Organisasi sayap partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik (Haris et al., 2016: 54). Organisasi sayap yang dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik berfungsi sebagai instrumen vital untuk menarik simpati serta mendapatkan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini, pada gilirannya, dapat membantu memenangkan partai dalam kompetisi politik dengan cara yang elegan dan bermartabat. Sebab, organisasi sayaplah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, memberikan informasi mengenai program-program partai, sementara partai politik itu sendiri cenderung lebih terlihat dalam kegiatan-kegiatan politis.

Organisasi sayap partai politik dapat mencakup berbagai kelompok seperti organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi buruh, organisasi tani, organisasi profesi, organisasi keagamaan (Haris et al., 2016: 54), serta kelompok-kelompok rakyat yang terorganisir. Kelompok-kelompok ini sebenarnya merupakan sumber daya yang perlu dibina dan terus dikembangkan dalam kerangka organisasi sayap atau *underbow* partai. Organisasi sayap partai politik ini memegang peranan penting dalam proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik (Haris et al., 2016: 54).

Organisasi sayap yang dikembangkan dan diberdayakan oleh partai

politik berfungsi sebagai instrumen yang sangat penting untuk menarik simpati dan dukungan seluas-luasnya dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, organisasi sayap memiliki peran strategis dalam membantu partai politik memenangkan kompetisi politik dengan cara yang elegan dan bermartabat. Hal ini terjadi karena organisasi sayap secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai program-program partai politik, sementara partai politik itu sendiri lebih terlihat melalui kegiatan-kegiatan politis yang diadakan.

Keberadaan partai politik sering kali mendorong pembentukan organisasi sayap baru, terutama jika partai merasa kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Partai politik, yang tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi, bahkan menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem tersebut. Melalui partai politik, kebijakan dibuat melalui mekanisme pembuatan produk perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan organisasi sayap sangat penting untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja partai politik, khususnya yang berada di legislatif. Pengawasan ini dilakukan secara internal oleh kader organisasi sayap yang juga berperan sebagai politisi dalam partai politik, sementara pengawasan eksternal dilakukan melalui demonstrasi dan kritik yang disampaikan melalui media massa.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi Konsep adalah tujuan Peneliti dapat menjawab pertanyaan

dengan pedoman teori digunakan, sehingga dapat mengukur variabel yang diperoleh dengan saluran serta mekanisme yang dijalankan di dalam penelitian. Penelitian yang akan digunakan yaitu “Komunitas Juang: Eksistensi Organisasi Sayap Partai PDI-Perjuangan di Jawa Tengah”. Penulis akan mencoba menggali mengenai eksistensi Komunitas Juang sebagai organisasi sayap partai yang bergerak pada bidang pendidikan dan pelatihan kader

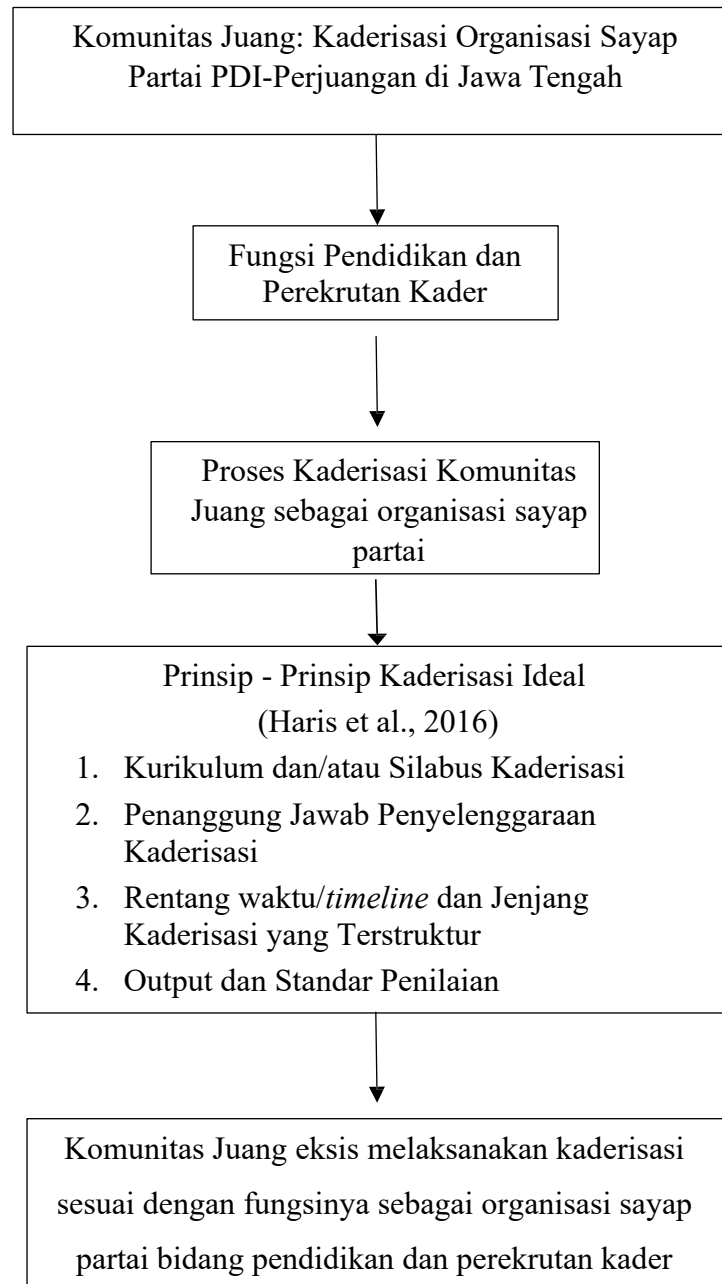
Tabel 1.3.
Indikator Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator
Prinsip-Prinsip Kaderisasi Ideal	Kurikulum dan/atau Silabus Kaderisasi	a. Kurikulum dan silabus harus mencakup tujuan, capaian, output, dan pengkayaan yang relevan dengan visi dan misi organisasi; b. Kurikulum dan silabus yang terstruktur mengenai topik atau materi yang diberikan sesuai dengan tujuan organisasi; c. Kurikulum dan silabus kaderisasi harus mencakup model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan organisasi;

	Penanggung Jawab Penyelenggaraan Kaderisasi	a. Divisi atau bidang yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan kaderisasi; b. Divisi atau bidang yang bertanggung jawab untuk merancang pelaksanaan kegiatan kaderisasi; c. Divisi atau bidang yang bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan kaderisasi;
	Rentang Waktu/ <i>Timeline</i> dan Jenjang Kaderisasi yang Terstruktur	a. Rentang waktu yang terstruktur dan berkala dalam penyelenggaraan kaderisasi; b. Rangkaian kaderisasi yang mencakup jenjang tingkatan kaderisasi (misalnya, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut); c. Rangkaian kaderisasi yang mencakup fase-fase kaderisasi (misalnya, fase

		perekrutan, pengenalan, pemberian materi, dan pengkaryaan);
	<i>Output dan Penilaian</i>	a. Adanya <i>Output</i> atau luaran yang terukur dari pelaksanaan kaderisasi dari tiap tingkatan dan fase kaderisasi; b. Standar penilaian dari standar kompetensi yang ada untuk mengukur kualitas kader;

1.8. Kerangka Berpikir



1.9. Metodologi Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana menurut John. W Creswell dan C. N. Poth (Creswell dan Poth, 2016) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelurusan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral dengan melakukan wawancara kepada peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas, yang kemudian informasi tersebut dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi lebih dalam.

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah penggunaan metode kualitatif, seperti observasi, wawancara, atau tinjauan pustaka. Metode kualitatif ini digunakan untuk beberapa alasan; Pertama, lebih mudah untuk mengadaptasi metode kualitatif karena berhubungan dengan banyak realitas; Kedua, metode ini dapat secara langsung mewakili sifat hubungan antara responden dan peneliti. Ketiga, metode ini lebih sensitif dan dapat mengakomodasi berbagai efek ketajaman pada model nilai yang dihadapi (Creswell dan Poth, 2016). Selain itu, metode penelitian kualitatif memiliki karakteristik deskriptif. Dimana data yang dikumpulkan berupa kalimat, gambar, bukan angka. Hal ini disebabkan penerapan metode kualitatif, dan semua data yang dikumpulkan dapat menjadi kunci hasil penelitian.

Dalam mengumpulkan, mengungkapkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan

deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:15) menyatakan penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositiveisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di kantor DPD PDI-Perjuangan Jawa Tengah atau Panti Marhaen. Untuk lokasi dari Panti Marhaen sendiri berada di Jl. Brigjen Katamso, Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu Pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah, Mentor Juang, Asisten Mentor Juang Komunitas Juang Jawa Tengah, serta Kader Komunitas Juang Jawa Tengah dan narasumber lain yang dibutuhkan untuk penggalan informasi lebih mendalam.

1.9.4. Jenis dan Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data hasil wawancara yang telah diperoleh langsung oleh peneliti. Data tersebut digunakan sebagai penjelasan dan informasi terkait eksistensi dan partisipasi Komunitas Juang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan secara tidak langsung. Informasi ini didapatkan dari penelitian-penelitian lain atau terdahulu yang ditulis oleh peneliti lain serta memiliki keterkaitan topik seperti jurnal, laporan penelitian, dokumentasi, dan sumber data lainnya.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang telah disesuaikan dengan kondisi, waktu, biaya, serta keefektifan penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antar individu yang dilakukan untuk memperoleh dan bertukar informasi dengan cara tanya jawab sehingga dapat disimpulkan menjadi informasi yang jelas dalam topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2015:72). Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari Ketua DPD PDI-Perjuangan, Asisten Mentor Juang Komunitas Juang Jawa Tengah, serta Koordinator Komunitas Juang Jawa Tengah..

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai macam yaitu seperti foto, rekaman wawancara, catatan hasil penelitian, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian mengenai Komunitas Juang Jawa Tengah.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisaikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345). Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang dijelaskan oleh Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007:204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah langkah tersebut terbagi sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang jelas dan akurat.

b. Penyajian data

Penyajian data pada data kualitatif sering digunakan dalam bentuk naratif. Penyajian tersebut berisi tentang hasil informasi yang telah tersusun secara sistematis dan dapat dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang sudah disusun

dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian ini.